

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Arrizal, Nizam Zakka, dan Muhammad Ali Fauzi. Aspek Hukum Sertipikat Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: Yustisia Merdeka, 2023.
- Basah, Syahran. Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Effendi, Perangin. Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Effendi, Jonaerdi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2016.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan, 2019.
- Hutagalung, Arie Sukanti. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Santoso, Urip. Hukum Pertanahan dan Transformasi Digital. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sumardjono, Maria S.W. Digitalisasi Sertipikat Tanah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2008.

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam, 2020.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dan perubahannya dengan UU Nomor 19 Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang **Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 23 Tahun 2021 tentang SPBE Pertanahan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-400.02/III/2024 tentang Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik.

Jurnal Ilmiah

Aziziyah, A. "Tumpang Tindih Sertifikat Tanah dan Elektronifikasi Sertifikat sebagai Solusi." *Legal Spirit* 7, no. 2 (2023): 216–220.

Gusmara, Gregorius Rianggi, Rahayu Subekti, dan Andina Elok Puri Maharani. "Analisis Perlindungan Hukum atas Pendaftaran Tanah dengan Sistem Publikasi Negatif." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 5 (2023): 10–15.

Nasution, Ahmad. "Digitalisasi Sertipikat Tanah dan Modernisasi Sistem Pertanahan." *Jurnal Hukum dan Teknologi Pemerintahan* 2, no. 1 (2023): 18–25.

Oktaviani, Sherly, dan Benny Djaja. "Sistem Publikasi Pertanahan yang Menjamin Kepastian Hukum Sertifikat Hak atas Tanah." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 7, no. 2 (2023): 123–130.

Putri, Rika. "Peran PTSL dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021): 85–90.

Puspita, E. F. D. "Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Tanah yang Tumpang Tindih." *Jurnal Pagaruyuang* 5, no. 1 (2025): 42–45.

Sari, Mega. "Dampak Sertifikasi Tanah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Agraria Nusantara* 5, no. 1 (2022): 55–63.

Dokumen Resmi, Website Pemerintah, Putusan

ATR/BPN. *Roadmap Digitalisasi Pertanahan Nasional 2024–2029*. Jakarta, 2024.

ATR/BPN. *Laporan Implementasi Sertipikat Elektronik Tahun 2024*. Jakarta, 2024.

ATR/BPN. *Makalah FGD Nasional Digitalisasi Pertanahan*. Semarang, 2025.

ATR/BPN. *Evaluasi Peraturan Pelaksanaan Sertipikat Elektronik Tahun 2025*. Jakarta, 2025.

BPN Kota Padang. *Profil Permasalahan Pertanahan Kota Padang*. Padang, 2023.

BPN Kota Padang. *Laporan Efisiensi Pelayanan Sertipikat Elektronik 2025*. Padang, 2025.

BPN Kota Padang. *Rekapitulasi Penerbitan Sertipikat Elektronik Tahun 2025*. Padang, 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Diseminasi Data Penduduk 2025*. Padang, 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 248 K/TUN/2021.

Antara Sumbar. “Ratusan Warga Unjuk Rasa di BPN Padang Protes Sertifikat Tanah Diblokir,” 22 November 2023. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/199928/ratusan-warga-berunjukrasa-di-bpn-padang>

ATR/BPN. “Profil Permasalahan Pertanahan Kota Padang 2023.” Diakses 16 September 2025. <https://www.atrbpn.go.id>

Wawancara dan Data Lapangan

Armando, Ria Satrina, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Padang. Wawancara di Kantor PPAT Kota Padang, 21 Oktober 2025.

Benie, Dr. Beatrix, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Padang. Wawancara di Kota Padang, 23 Oktober 2025.

Chandra, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kota Padang. Wawancara di BPN Kota Padang, 4 November 2025.

Fajri, Septiadi, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Padang. Wawancara di Kota Padang, 20 Oktober 2025.

Harsian, Hanafi Syahputra, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Padang. Wawancara di Kota Padang, 23 Oktober 2025.

Lisza, Lusiah, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Padang. Wawancara di Kota Padang, 22 Oktober 2025.

Renof, Kasnel Andi, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Padang. Wawancara di Kota Padang, 20 Oktober 2025.

Wawancara dengan masyarakat pemohon sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Padang, 25 Oktober 2025.

Observasi Lapangan di Kantor Pertanahan Kota Padang, Oktober–November 2025.